

KEMAJEMUKAN DAN ADAPTASI BUDAYA ANTARETNIS

Oleh : Alfitri¹

Abstract

This article tries to describe the tendencies of social disintegration lately in Indonesia. The tendencies cause of the plurality in Indonesia society of which not yet well backing up by interethnic cultural adaptation. The effort to promotes and making interethnic cultural adaptation is necessary to revitalize good understanding of culture and religion of it's society which guide by tolerant culture. Beside, it is also needed to develop democratic live due to strong law enforcement.

Pendahuluan

Sejak beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia terus menerus dikagetkan, digelisahkan, disedihkan dan ditakutkan oleh pertentangan dan kerusuhan-kerusuhan yang ber sifat antaretnis. Pertentangan antaretnis menggejala dan meledak di berbagai pelosok tanah air: Sambas, Sampit, Ambon, Aceh, Batam, Kupang dan awal Juli 2001 yang lalu juga di Pontianak. Secara umum, dapat dikatakan bahwa pertentangan itu berlang-

sung antara etnis lokal versus etnis pendatang. Konflik antar etnis tersebut semakin menyadarkan kita atas dua hal. *Pertama*, masyarakat Indonesia yang majemuk ini sangat rentan/rawan terhadap disintegrasi sosial. *Kedua*, betapa rapuh dan belum mantapnya pembangunan persatuan dan proses adaptasi antar etnis yang terjadi atau dikembangkan dalam masyarakat Indonesia.

Berangkat dari hal-hal di atas, maka tulisan pendek ini akan mencoba melihat faktor-faktor yang menyebabkan atau mempe-

¹ Penulis adalah staf pengajar di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas dan saat ini dipercaya menjabat Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan FISIP Universitas Andalas

ngaruhi terjadinya pertentangan. Kemudian akan dilihat pula, langkah-langkah apa yang dapat dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan adaptasi antar etnis. Namun sebelumnya, secara ringkas akan ditinjau dulu konsepsi masyarakat majemuk dan keberadaan Indonesia sebagai masyarakat majemuk.

Masyarakat majemuk dan Indonesia sebagai masyarakat majemuk

Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih kelompok sosial, yang hidup berdampingan di dalam suatu ikatan politik dengan atau tanpa adanya percampuran dan secara struktural memiliki sub-sub kebudayaan yang saling berbeda. Perbedaan-perbedaan di antara kelompok-kelompok sosial tersebut bersifat primordial yakni meliputi perbedaan etnis, ras, bahasa, asal dan agama. Di dalam suatu negara bangsa (*nation-state*), perbedaan-perbedaan tersebut sering bersifat kumulatif atau berhimpitan. Misalnya, perbedaan geografis juga sering disertai atau bersamaan dengan perbedaan etnis berikut kebudayaannya seperti bahasa, adat istiadat, kesenian dan sebagainya. Contoh paling mu-

dah misalnya daratan Sumatera Barat yang didiami etnis Minangkabau dan Kepulauan Mentawai yang dihuni oleh etnis Mentawai memiliki ciri-ciri kebudayaan yang saling berbeda. Bahkan agama yang umumnya dianut oleh orang dari kedua etnis tersebut juga saling berbeda.

Dengan demikian, suatu masyarakat adalah majemuk karena adanya berbagai variable yang sekaligus menjadikan masyarakatnya itu secara internal saling berbeda. Namun, kemudian dalam perkembangan atau dinamikanya kadangkala muncul satu jenis perbedaan yang sering atau lebih memainkan peranan penting dalam proses disintegrasi. Sebagai contoh, perbedaan etnis memainkan peran dalam proses disintegrasi di beberapa negara Afrika, misalnya Rwanda yang sering dilanda perang suku antara Hutu dan Tutsi untuk memperebutkan kekuasaan, atau seperti di Srilanka yang sering dilanda konflik antara etnis Tamil dan Sinhala.

Selain itu, perbedaan rasial, di mana yang menjadi pembeda adalah ciri fisik seperti warna kulit, jenis rambut, dan sebagainya, sering menimbulkan konflik-konflik seperti kasus orang-orang Cina di beberapa

negara Asia Tenggara, dan orang-orang keturunan India atau orang-orang asli Afrika sendiri di Afrika Selatan. Di India, misalnya, negara-negara bagian terutama didasarkan pada batas-batas daerah penggunaan bahasa. Sementara, di Libanon dan wilayah Balkan, faktor penting yang dapat memunculkan konflik adalah agama.

Indonesia adalah salah satu bangsa yang dalam kenyataan sosiologisnya memiliki lingkungan sosial budaya yang mejemuk. Berbeda, misalnya dengan bangsa Jepang atau Jerman yang homogen, kemajemukan bangsa Indonesia ditandai oleh keberadaan dari sekitar 300 suku bangsa yang memiliki corak kebudayaannya sendiri-sendiri. Berbagai suku bangsa (kelompok etnis) tersebut tersebar di berbagai pulau nusantara ini dan hidup dengan kebudayaannya masing-masing. Di Pulau Flores yang kecil saja misalnya terdapat delapan kebudayaan yang saling berbeda. Di samping adanya kepercayaan-kepercayaan asli yang bersifat lokal, aspek lain yang menjadi ciri kemajemukan Indonesia adalah terdapatnya perbedaan agama yang dianut penduduknya.

Faktor yang sangat berpengaruh terhadap kemajemukan

masyarakat Indonesia adalah keadaan dan posisi geografis Indonesia yang terdiri dari sekitar 13.000 pulau yang tersebar di wilayah seluas lebih kurang 3.000.000 km persegi. Nenek moyang kita yang datang secara bergelombang dari daerah yang tidak sama dan kemudian mendiami daerah-daerah yang berbeda pula menjadikan Indonesia kaya dengan perbedaan-perbedaan kebudayaan. Keterpisahan secara geografis menyebabkan tumbuhnya berbagai kelompok etnis yang memiliki ikatan-ikatan asli dan fundamental (*primordial attachments*). Di samping itu, kenyataan bahwa Indonesia terletak di antara dua samudera, yakni antara Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik turut memberi pengaruh pada perkembangan kemajemukan masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang telah ditunjukkan sejarah, hal ini berhubungan dengan lalu lintas perdagangan laut dan masa kolonial yang memungkinkan masyarakat Indonesia menerima berbagai pengaruh dari bangsa-bangsa lain.

Potensi dan Faktor-faktor Konflik

Dinamika sosiologis bangsa Indonesia telah ditandai

oleh serangkaian mobilitas, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal. Dalam artian mobilitas horizontal, sebagian etnis yang ada dengan disebabkan oleh sejumlah *push and pull factors* pergi keluar dari wilayah budayanya ke tempat-tempat atau daerah lain di nusantara. Orang Minang, misalnya demi penghidupan dan tuntutan budayanya, pergi merantau ke mana-mana di berbagai daerah di nusantara ini. Hal yang sama juga dilakukan oleh orang Jawa, Madura, Bugis, Ambon, Batak dan sebagainya. Dengan demikian, terjadilah pertemuan dua atau sejumlah etnis di suatu daerah etnis tertentu yang lebih dominan, seperti orang Minang, Bugis dan Buton yang berada di daerah Ambon dan sebagainya.

Di samping itu, dinamika pem bangunan telah pula memungkinkan munculnya mobilitas sosial vertikal yang berdampak pada penajaman perbedaan pelapisan-pelapisan sosial dalam masyarakat Indonesia. Dengan latar umum terdapatnya kesenjangan sosial ekonomi atau jurang antara si kaya dan si miskin, di berbagai tempat di tanah air terdapat kenyataan dimana etnis-etnis pendatang "kelihatan lebih beruntung" dalam perolehan ekonomi dan kadangkala dipan-

dang sebagai ancaman bagi penduduk lokal. Hal ini menjadi bahaya *latent* (tersembunyi) yang sewaktu-waktu dapat meledak menjadi konflik yang menjurus pada disintegrasi. Tragedi kemanusiaan di Ambon telah menunjukkan persoalan ini dan itu menjadi lebih parah lagi karena diwarnai pula oleh perbedaan agama.

Pergesekan atau konflik di antara sesama pedatang juga tidak jarang terjadi. Dalam skala yang lebih kecil misalnya, preman dari berbagai kelompok etnis terlibat pertikaian beberapa waktu yang lalu di terminal Kampung Rambutan, Jakarta. Persoalan yang mengemuka tentulah masalah rezeki, namun bukan tidak mungkin dibelakangkannya terdapat sentimen-sentimen antaretnis yang lebih dalam. Baru-baru ini saja hal yang serupa juga terjadi di Batam antara orang-orang yang berasal dari Flores dan Batak dimana pertikaian yang terjadi juga menyebabkan jatuhnya belasan korban jiwa. Pertikaian yang melibatkan antaretnis baru-baru ini juga terjadi di Pasar Senen Jakarta. Hal-hal tersebut bagaimana napun menjadi kerawanan-kerawanan yang mengganggu pada stabilitas kamtibmas. Jika stabilitas kamtibmas terganggu

maka upaya pemulihan ekonomi secara keseluruhan tentu pula akan terganggu

Kembali ke pertanyaan kita semula, kenapa konflik-konflik itu terjadi dan apa faktor-faktor yang mempengaruhinya? Apabila ditinjau dari pendekatan kebudayaan maka kita dapat melihat beberapa hal yang memungkinkan terjadinya. Pendekatan kebudayaan yang digunakan adalah dari aspek budaya perilaku, dimana terdapatnya perbedaan antara pola-pola perilaku yang nyata (*actual behaviour*) dengan pola perilaku yang dikehendaki oleh norma kebudayaan yang berlaku (*expected behaviour*).

Pertama, semakin berkurangnya kemampuan beradaptasi dan budaya bertoleransi. Setiap etnis dengan kebudayaan yang dimilikinya pasti mempunyai ajaran mengenai cara menempatkan diri di tengah orang lain atau dalam lingkungan yang majemuk. Akan tetapi, penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran atau doktrin kebudayaan yang mengarah pada kemampuan adaptasi dan budaya toleransi di antara pendukung kebudayaan tersebut kian melemah. Padahal jika setiap etnis mencoba mengamalkan ajaran tersebut maka kemungkinan konflik dapat

berkurang. Budaya Minang, misalnya, mengajarkan kemampuan adaptasi dan budaya toleransi sebagai berikut:

"Dima bumi dipijak,
disinan langit dijunjung"

(Dimana bumi dipijak,
di sana langit dijunjung)

"Jago dirunciang kok
mencucuak, ingek ditajam kok maluko"

(Hati-hati dengan runcing yang akan menusuk, ingat dengan tajam yang akan melukai)

"Lamak diawak, katuju diurang"

(Enak bagi kita, enak pula bagi orang)

Di Ambon, misalnya terdapat pola tradisi *pela gendong* yang merupakan nilai budaya lokal yang mengajarkan saling penghormatan dan saling toleransi antara orang Ambon yang Islam dan orang Ambon yang Kristen. Namun, karena tradisi luhur tersebut telah melunturkan keberlakuannya dalam masyarakat Ambon sendiri, maka terjadilah konflik yang dapat disebut tragedi kemanusiaan.

Kedua, berkaitan pula dengan hal di atas apa yang kini tampaknya berkembang adalah budaya memaksakan kehendak, yakni ingin benar dan menang sendiri, tanpa memperdulikan keberadaan dan keinginan orang atau pihak lain. Sama halnya dengan yang di atas, dapat dipastikan bahwa aneka kebudayaan yang hidup di nusantara ini dan *Pancasila* sebagai dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidaklah mengajarkan sikap dan perilaku yang demikian. Namun apa yang kita saksikan dalam perjalanan kehidupan sosial politik kita hari-hari ini adalah sikap memaksakan kehendak. Kecenderungan ini akan sangat menyedihkan dan membahayakan serta memungkinkan terjadinya disintegrasi sosial yang lebih luas. Bagi kita orang Minang jelas ada ajaran yang mengatakan:

*"Kok gadang jan
malendo, kok cadiak
jan manjua"*
(Jika berkuasa jangan
menindas, jika cerdas
jangan menipu)

Apabila kita cermati kehidupan sosial politik Indonesia akhir-akhir ini, maka jelas tampak adanya keinginan dari

setiap pihak untuk menang sendiri dan memaksakan kehendak. Klaim untuk merasa paling reformis, paling konstitusional, hujat-menghujat, dan pertikaian antar kelompok yang terjadi hampir tidak mencerminkan budaya siap kalah dan lapang dada. Dari perkembangan sosial politik mutakhir kelihatan belum bertumbuh dan berkembangnya budaya demokrasi yang sehat dan sejati. Yakni budaya untuk saling berbeda dengan saling menghormati dan berkompetisi secara sehat. Kenyataan yang menyedihkan dalam hal ini adalah bahwa justru hal tersebut lebih banyak terjadi dan berlangsung di tingkat elit politik yang dampaknya juga mengimbas di tingkat masyarakat bawah (*grass root*). Konflik antaretnis di berbagai tempat di tanah air, ditengarai oleh sejumlah pakar dan pihak, tidak terlepas dari pertentangan antar elit di "pusat". Karena itu, ke depan membangun budaya demokrasi adalah tantangan pembangunan bangsa yang paling berat.

Ketiga, sejalan pula dengan yang di atas adalah masih rendahnya budaya (sadar) hukum dalam masyarakat kita. Masih banyak pihak dan orang yang bermasalah dan berperkara berupaya menyelesaikannya de

ngan cara-cara sendiri, tanpa merujuk kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Kenyataan yang berkembang adalah masih banyaknya pihak atau orang yang memakai "*ilmu basi*" (keinginan untuk menang dan benar sendiri), yakni *basibanak*, *basibagak*, *basipakak*, *basicadiak* dan *basi-basi* yang lain. Kalaupun ada pada awalnya ada yang mencoba mengacu pada hukum yang berlaku, namun aturan hukum yang ada dipelintir sedemikian rupa agar pihaknya lolos dari jerat hukum. Dengan demikian, cita-cita negara hukum (*rechts taat*) dengan adanya supremasi hukum masih merupakan cita-cita yang mesti diperjuangkan dengan kerja keras dan kerja cerdas.

Kenyataan adanya sejumlah kasus-kasus besar yang tidak tersentuh oleh hukum dan sering diupayakan untuk diselesaikan secara politis saja, atau sering dibiarkan menguap saja ketika publik mulai capek dan lupa untuk mengikutinya, jelas akan menjadi bahaya *latent* yang se waktu-waktu dapat menimbulkan disintegrasi. Pihak-pihak yang tidak puas dengan keadaan tentu akan tetap "memelihara" dan pada waktunya "mengeks ploitasi" isu-isu tersebut untuk kepentingannya. Akibatnya,

apabila kasus-kasus tersebut tidak segera dituntaskan secara hukum maka bangsa kita akan terlibat dalam berbagai rupa perselisihan dan pertikaian yang tidak berkesudahan. Jika itu terjadi, maka akibatnya jelas bahwa pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat akan tetap jalan di tempat.

Memajukan dan Mengembangkan Adaptasi

Upaya *pertama* dan utama dalam memajukan dan mengembangkan kemampuan adaptasi atau penyesuaian terhadap lingkungan budaya lain yang berbeda adalah dengan merevitalisasi penghayatan dan pengamalan terhadap budaya masing-masing yang mengajarkan hubungan baik, saling penghargaan dan sikap bertoleransi dalam kemajemukan. Hal ini, pertama kali dilaksanakan dalam proses sosialisasi dalam keluarga dan di sekolah-sekolah.

Kedua, dalam masyarakat dicoba untuk menghilangkan penggunaan "*stereotype ethnics*" atau pelabelan secara subjektif menyangkut suku bangsa-suku bangsa tertentu atau lainnya secara negatif. Misalnya, berbagai lingkungan-lingkungan dalam interaksi sosial yang bersifat

menghina atau merendahkan (seperti orang Batak itu kasar, orang Jawa itu lamban, orang Padang itu "bengkok", orang Madura itu suka berkelahi dan sebagainya). Usaha ke arah ini mestinya dilakukan oleh generasi yang lebih senior dengan memberi contoh yang baik pada generasi yang lebih muda.

Ketiga, meningkatkan dan mengembangkan komunikasi antar kelompok (budaya), antara lain dengan tersedianya berbagai forum komunikasi di antara orang dari berbagai etnis guna menghindarkan berbagai miskomunikasi atau salah pengertian menyangkut kemampuan, sifat dan karakter dari orang-orang dengan latar belakang budaya lain. Melalui komunikasi tersebut sekaligus dilakukan usaha mencegah adanya persaingan yang menjurus "menang-kalah" dan merubahnya menjadi "menang-menang": *awak baruntuang, kawan balabo*, atau setidaknya *awak mendapek, urang indak kailangan* (kita mendapat, orang tidak kehilangan).

Keempat, secara umum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu semakin dikembangkan budaya demokrasi yang sehat yang berlandaskan hukum. Demokrasi tanpa aturan hukum adalah

anarki, dan anarki akan membawa kepada kehancuran seluruh pihak. Ini berarti "*menang jadi arang, kalah jadi abu*" (menang jadi arang, kalah jadi abu).

Kelima, dengan mengamalkan ajaran agama yang berkaitan dengan pesan kerukunan dan toleransi. Dalam Agama Islam, misalnya, disebutkan bahwa:

"Sesungguhnya Aku ciptakan kamu berbangsa-bangsa dan berkelompok-kelompok, supaya saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu adalah yang paling taqwa" (Q.S. Al Hujurat : 13)

Firman Allah di atas mengingatkan kita, umat manusia, bahwa perbedaan, keragaman dan kemajemukan di antara kelompok-kelompok manusia (suku bangsa) sesungguhnya adalah rahmat dan anugerah, dan bukan sebaliknya, laknat dan musibah. Sesungguhnya pula, Allah tidak menciptakan segala sesuatu yang dunia sama dan seragam bentuknya, karena Dia cinta dengan keindahan dan perbedaan atau keragaman adalah suatu keindahan. Bukankah taman menjadi indah karena warna-warni bunga? Bukankah pohon-pohon di gunung tidak

sama tingginya, awan yang berarak tidak sama bentuk nya?

Di antara kelompok-kelompok manusia yang saling berbeda itu, kemuliaan bukan ditentukan oleh warna kulit, mancungnya hidung, bentuk rambut, tinggi badan, ataupun oleh dominasi melalui kekuatan ekonomi atau

teknologi, melainkan karena ketaqwaan kepada-Nya, setiap kelompok atau suku-suku diminta untuk saling kenal mengenal, saling belajar, saling bekerja sama, saling menghargai dan saling bertoleransi agar kehidupan menjadi mudah dan indah.***

Daftar Pustaka

Alfian, *Persepsi Masyarakat tentang Kebudayaan*, Gramedia, Jakarta, 1985

Alfitri, *Kesadaran Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat : Suatu Pandangan Sosiologi*, dalam *Yustisia* No.8 tahun VI/1999, Hal 68-72

Geertz, Hildred, *Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia*, Pulsar, Jakarta, 1981

Koentjaraningrat, *Masalah-masalah Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1984

Sparingga, Daniel, *Konflik dan Resolusi Konflik*, FISIP Universitas Airlangga

Suparlan, Parsudi, Masyarakat Majemuk Indonesia : Potensi Konflik dan Pemecahannya, Simposium Satelit Kepedulian UI terhadap Integrasi Bangsa Indonesia, 21 April 1999